

BAB I

A. Latar Belakang

Kepadatan penduduk Indonesia yang besar dan pertumbuhan populasi yang cepat mengakibatkan peningkatan volume sampah. Peningkatan volume sampah tidak hanya terbatas pada jumlahnya, tetapi juga pada jenis sampah yang terus bertambah. Kota Yogyakarta, sebagai salah satu kota metropolitan, sedang berusaha untuk mengatasi masalah sampah ini. Timbunan sampah yang tidak terkelola dengan baik menghasilkan bau yang tidak sedap dan menjadi tempat berkembangnya lalat penyebab berbagai penyakit. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak sembarangan membuang sampah. Pemahaman baru dalam pengelolaan sampah dilakukan melalui pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah mencakup pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sementara penanganan sampah mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir.(Hidayanti & Efendi, 2021)

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu penting dalam pengembangan perkotaan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat vital dalam mengelola persoalan ini, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kota Yogyakarta, sebagai ibu kota DIY, telah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Permasalahan ini mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengatasi kompleksitasnya.(H. P. Putra et al., 2019)

Collaborative governance, atau tata kelola kolaboratif, adalah pendekatan yang semakin relevan dalam menghadapi masalah lingkungan seperti pengelolaan sampah. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif dalam berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, juga lembaga akademik, didalam proses pengambilan keputusan juga pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Kota Yogyakarta, peran kolaboratif pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya dipahami, dieksplorasi, atau dinilai.(H. P. Putra et al., 2019)

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, DIY adalah salah satu provinsi dengan otonomi khusus di Indonesia, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan lokal. Namun, bagaimana pemerintah daerah Kota Yogyakarta, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah masih perlu dipelajari lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam tentang kolaborasi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.(Arsanti & Giyarsih, 2012)

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan berkelanjutan suatu daerah. Di Yogyakarta, permasalahan pengelolaan sampah menjadi semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang terus berlangsung. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu TPST Piyungan adalah salah satu fasilitas yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan ini tetapi saat ini sudah ditutup.(Arsanti & Giyarsih, 2012)

Collaborative governance adalah pendekatan yang mengedepankan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi kebijakan.(H. P. Putra et al., 2019)

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan sampah, telah berusaha untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pengelolaan sampah. Namun, belum banyak penelitian yang mendalam mengenai sejauh mana kolaborasi ini telah berjalan efektif dan sejauh mana hasil-hasilnya telah memenuhi harapan dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sampah.(Mulasari et al., 2016)

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis implementasi collaborative governance yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Penelitian ini juga akan menganalisis dampak dari kolaborasi tersebut terhadap efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.(Arsanti & Giyarsih, 2012)

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan temuan-temuan yang dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Yogyakarta untuk meningkatkan kolaborasi dalam pengelolaan sampah, serta memberikan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan

pemahaman tentang collaborative governance dalam konteks pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di Kota Yogyakarta (Arsanti & Giyarsih, 2012).

Pada tahun 2018, data menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menyumbang jumlah sampah terbesar yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA), dengan persentase sebesar 34,89%. Kota Sleman menyusul dengan 13,17%, diikuti oleh Kulon Progo dengan 7,20%, Gunung Kidul dengan 5,37%, dan terakhir Bantul dengan 1,91%. Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta karena kota ini merupakan penyumbang sampah terbanyak yang akhirnya berakhir di TPA Piyungan. Dalam satu hari, setiap individu di Kota Yogyakarta menghasilkan sekitar 900 gram sampah. Dalam keluarga beranggotakan lima orang, ini berarti 4.500 gram sampah per hari atau sekitar 1.620 kg per tahun. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta telah melakukan evaluasi dan menemukan bahwa setelah sektor perumahan, transportasi, dan komersial, sampah ternyata menjadi penyumbang emisi keempat terbesar dalam masyarakat, dengan emisi sekitar 158.692 (Mulasari et al., 2016). Yogyakarta menduduki peringkat kedua kabupaten dan kota dalam hal kontribusi harian pada tahun 2022, dengan rata-rata 270 ton. Angka tersebut menunjukkan bahwa 99,34% sampah telah tertangani secara efektif, dengan rincian 22,68% berasal dari reduksi sampah dan 76,78% berasal dari sumber lain. Yogyakarta masih bertanggung jawab memperhitungkan 1,87 ton (0,57%) sampah yang belum diolah. Data menunjukkan bahwa bank sampah di Yogyakarta menangani 0,74 metrik ton sampah per tahun, oleh karena itu pemanfaatannya jelas perlu dimaksimalkan (Galuh, 2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang dapat disimpulkan yaitu bagaimana Pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dengan perspektif *Collaborative Governance*.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui atau menjelaskan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dengan perspektif *Collaborative Governance*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini maka dapat diharapkan memberikan pengetahuan yang mendalam bagi semua pihak dan juga sebagai salah satu tambahan untuk pengembangan secara teoritis khususnya pada kajian masalah yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka besar harapan dapat memberikan sebuah pemahaman terkait pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Daerah di Kota Yogyakarta dan bahan masukan untuk Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah ataupun sebagai saran referensi bagi kalangan

praktisi dan akademisi untuk dapat menunjang penelitian selanjutnya yang juga akan menjadi bahan evaluasi maupun perbandingan bagi penelitian yang lain.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan sebanyak 15 *literature review* yang juga memiliki cara pengelolaan sampah menggunakan *collaborative governance* sebagai acuan terkait dalam pengelolaan sampah ataupun judul tema yang sesuai dengan penelitian tersebut.

Tabel 1.1 *Literature Review*

No	Penulis	Judul	Literature
1.	(Yasintha, 2020)	“Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tasikmalaya”	Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan Collaborative Governance didalam konteks pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya, dengan melibatkan aktif partisipasi berbagai pihak seperti pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, maupun kelompok masyarakat, belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Dalam rangka mengatasi permasalahan sampah, temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa Collaborative Governance masih memiliki potensi sebagai solusi yang berkelanjutan juga efektif karena dapat menjalin beragam kepentingan yang ada.
2.	(Syawal et al., 2021)	“Implementasi Kebijakan Persampahan Berbasis Collaborative Governance Di Kota	Dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan persampahan berbasis collaborative governance di Kota Makassar

		Makassar”	telah berhasil. Organisasi dan hubungan antar organisasi telah berhasil mengimplementasikan kebijakan ini di kota tersebut. Semua pemangku kepentingan dalam kebijakan persampahan di Kota Makassar, termasuk UPT Bank Sampah, YPN, dan BSU, telah menunjukkan komitmen untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini tercermin dalam pernyataan mereka dan terbukti melalui koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, setiap pemangku kebijakan persampahan di Kota Makassar, termasuk UPT Bank Sampah, YPN, dan BSU, telah berhasil menerapkan kebijakan persampahan ini secara efektif sesuai dengan prinsip kolaboratifnya.
3.	(Hidayanti & Efendi, 2021)	“Praktik Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Diy Dalam Pengelolaan Tpa Regional Piyungan Tahun 2020)”	Hasil dari penelitian ini Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup DIY dalam Pengelolaan TPA Daerah Piyungan Tahun 2020. Menorehkan sejarah, Dinas Lingkungan Hidup DIY melakukan kolaborasi pengelolaan sampah dan proyek infrastruktur lainnya di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul .
4.	(Djogeh Harmana et al., 2021)	“Pengelolaan Sampah Berbasis Collaborative Governance Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara”	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta masih belum optimal, di mana sektor swasta hanyalah memberikan bantuan

			<p>finansial tanpa terlibat secara aktif dalam upaya lain. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah masih terasa terbatas, meskipun telah ada program yang diterapkan. Dalam konteks ini, dibutuhkan usaha dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan yang berperan sebagai pengkoordinasi pengelolaan sampah untuk meningkatkan partisipasi baik dari masyarakat maupun sektor swasta.</p>
5.	(Amri, 2023)	<p>“Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru”</p>	<p>Ditemukan bahwa tingkat kepercayaan terhadap pemerintah masih rendah karena terdapat hambatan dalam komunikasi, serta informasi yang diberikan kepada masyarakat seringkali terlambat. Faktor-faktor yang mendukung meliputi ketersediaan sumber daya yang memadai, eksistensi otoritas atau kewenangan, dan komitmen yang kuat. Di sisi lain, faktor-faktor yang menghambat mencakup kurangnya kepercayaan dan keterbatasan informasi.</p>
6.	(Cipta Insan Setinggi Pekasih, Engkus, 2022)	<p>“Collaborative Governance Dalam Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan) Untuk Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kota Bandung”</p>	<p>Hasil yang didapat Meskipun hasil kolaborasi multipihak cukup memuaskan, program ini masih memerlukan peninjauan dan penyempurnaan untuk memastikan bahwa program ini dapat berfungsi dengan baik; Hal ini diperlukan mengingat rumit dan beratnya permasalahan sampah Kota Bandung.</p>

7.	(Pundenswari et al., 2023)	“Green Economy Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Garut”	Temuan studi ini menunjukkan bahwa ada dimensi dalam proses kolaborasi. 1) DLH telah melakukan interaksi antarmuka dengan pemangku kepentingan. 2) Memperkuat rasa percaya diri yang telah dibangun pemerintah, khususnya melalui pengembangan program Kang Raling dan PUDING sebagai wujud ketaatan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Strategi dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. 3) Dalam hal dedikasi terhadap proses tersebut, DLH saat ini aktif membangun beberapa desa dari 6 kecamatan. 4) Saling pengertian antara DLH dengan pemangku kepentingan terkait masih terhambat oleh perbedaan persepsi yang menunjukkan belum tercapainya visi bersama. Juga 5) Hasil Keberhasilan menunjukkan bahwa masyarakat yang telah menerima pelatihan dari spesialis DLH mampu menangani masalah mereka.
8.	(M. R. S. Putra, 2023)	“Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Masalah Sampah Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat”	Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kendala dalam upaya kolaborasi untuk menangani masalah sampah di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kendala-kendala ini mencakup kurangnya fasilitas dan infrastruktur pendukung, seperti masalah transportasi yang terbatas dalam pengangkutan sampah, kekurangan personel, dan keterbatasan anggaran untuk

			personil lapangan, yang mengakibatkan kurangnya kesiapan personel dalam mengelola sampah karena kurangnya dukungan material bagi mereka.
9.	(Chofifah, 2022)	“Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone telah terwujud melalui pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat keterbatasan dalam peran kelompok tersebut, yang terbatas pada pengangkutan sampah.
10.	(Eka et al., 2023)	“Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah”	Berdasarkan hasil penelitian, kerjasama di Tempat Pembuangan Sampah Terkendali (TPST) "Tanggung Jawabku" di Kabupaten Lamongan berjalan lancar, walaupun masih ada beberapa kendala. Penelitian ini menyatakan bahwa tata kelola kolaboratif telah beroperasi dengan baik, yang tercermin dalam aspek kolaborasi yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash.
11.	(Bustomi et al., 2022)	“Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung”	Berdasarkan hasil penelitian, Ada sejumlah keuntungan jika melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah membantu pembuatan kebijakan yang lebih baik dengan membuat pengambil keputusan menjadi lebih kompeten. Alasan lainnya adalah bahwa kondisi awal

			<p>suatu kolaborasi dapat membantu atau merugikan kerja sama antar pemangku kepentingan dan antar lembaga. Mekanisme tata kelola yang partisipatif rentan terhadap manipulasi oleh pihak yang lebih berkuasa jika sumber daya tidak tersedia untuk partisipasi atau jika pemangku kepentingan tidak diperlakukan setara. Pengelolaan sampah di pasar selama ini kurang baik, berdasarkan temuan observasi dan observasi lapangan.</p>
12.	(Bekti & Pancasilawan, 2024)	“Membangun Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung”	<p>Hasil dari program ini, para peserta berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon, dan terjadi peningkatan komunikasi terbuka dan keterbukaan mengenai permasalahan daerah.</p>
13.	(Avitadira & Indrawati, 2023)	“Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021 : Tinjauan Collaborative Governance”	<p>Dengan harapan dapat menemukan solusi permasalahan sampah di DKI Jakarta, maka penelitian ini akan mengkaji Collaborative Governance. Kesadaran bersama akan semakin gawatnya permasalahan sampah di DKI Jakarta mendorong Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, dunia usaha, dan masyarakat bersatu dalam upaya mencari solusi.</p>
14.	Maulana Fajar Gimnastiar, Teguh Yuwono, Neny Marlina	“Implementasi Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa kriteria keberhasilan, termasuk kepercayaan, komitmen kuat, sumber daya berkualitas, dan</p>

		Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang (Bank Sampah Indria Jaya)”	pembagian tanggung jawab yang jelas, dapat berdampak besar pada tahap kolaborasi. Dampak dan respon positif masyarakat Desa Kalipancur menjadi buktinya. Selain itu, bekerja sama di bank sampah dapat memberikan manfaat lebih dari sekadar mengurangi penumpukan sampah; hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
15.	(Rahmawati et al., 2023)	“Proses Collaborative Governance Dalam Program Pengurangan Sampah Di TPA Jabon, Kabupaten Sidoarjo”	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih baik mengenai pendekatan tata kelola kolaboratif program pengurangan sampah di TPA Jabon Sidoarjo. Berdasarkan temuan penelitian ini, “Program Pengurangan Sampah” di TPA Jabon, Sidoarjo secara eksklusif melibatkan organisasi informal dan masyarakat dalam proses tata kelola kolaboratifnya; sektor komersial tidak terlibat dalam pengelolaannya.

Berdasarkan tinjauan Pustaka diatas persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ini rata-rata menggunakan teori *Collaborative Governance* dari *Anshell and Gash* yang, pada penelitian ini menggunakan teori *Anshell and Gash* dan *DeSeve Moore* sebagai item penting yang menjadi tolak ukur akan keberhasilan adanya kolaborasi pemerintah.

F. Kerangka Teori

1. Collaborative Governance

Menurut Robert and Taehyon menjelaskan bahwa *collaborative governance* didefinisikan menjadi “*Collaborative governance is a collective and egalitarian process in that participants are endowed with substantive authority to make collective decisions, and each stakeholder possesses an equal opportunity for its preferences to be reflected in the collective decision.*” Tata kelola kolaboratif, sebagaimana dijelaskan dalam pernyataan ini, adalah proses demokratis di mana semua pihak terkait bekerja sama untuk mengambil keputusan; masing-masing pihak mempunyai kesempatan yang adil untuk menyuarakan pendapatnya dan mempertimbangkan pendapat tersebut oleh kelompok secara keseluruhan (Yasintha, 2020).

Definisi *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash mengemukakan : “Collaborative Governance sebagai sebuah strategi baru dalam tata Kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat consensus yang bersama”. Ketika mengelola suatu sektor membutuhkan kekuatan analitis, keuangan, dan teknis yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh satu entitas, maka tata kelola kolaboratif diperlukan. Berkolaborasi, dalam konteks administrasi publik, berarti terlibat dalam upaya bersama atau, lebih khusus lagi, berkomunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan (Amri, 2023). Ansell dan Gash juga mendefinisikan

Collaborative Governance yaitu struktur tata kelola yang menyatukan aktor-aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan disengaja dengan tujuan mengembangkan atau melaksanakan kebijakan publik atau mengawasi program atau aset publik.

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli, peneliti bisa menarik satu poin Berdasarkan pandangan beberapa pakar, pengertian dan konsep *Collaborative Governance* dapat dijelaskan sebagai upaya juga respon dari pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah publik, mengelola administrasi pemerintah, dan melaksanakan program pemerintah yang lain. Dalam konteks ini, pemerintah harus menjalin kemitraan atau kerja sama yang lebih banyak bersama masyarakat dan sektor swasta, mengingat kompleksitas program, kegiatan, dan tantangan yang dihadapi.(Amri, 2023)

DeSeve Moore, (2009) Pada (Amri, 2023) disebutkan adanya beberapa item penting yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan dari Network atau kolaborasi dalam governance, item tersebut diantaranya :

1. *Trus among the participants* (adanya saling percaya antara partisipan)

Kepercayaan di antara para peserta didasarkan pada hubungan profesional atau sosial, yaitu keyakinan bahwa mereka dapat mengandalkan informasi atau upaya yang diberikan oleh pihak terkait yang lain didalam adanya jaringan dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Untuk lembaga pemerintah, elemen ini memiliki

signifikansi besar karena mereka harus meyakinkan bahwa mereka mematuhi mandat undang-undang atau peraturan, dan bahwa mereka dapat memiliki "kepercayaan" pada mitra kerja mereka dalam jaringan pemerintah (termasuk berbagai divisi, departemen, kantor, atau badan di tingkat pemerintahan daerah) dan mitra di luar pemerintah ditugaskan menjalankan aktivitas yang sudah disepakati bersama.

2. *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas)

Ini mencakup konsep berbagi dalam tata kelola (pengaturan, manajemen, dan pengelolaan bersama) bersama pihak terkait lainnya serta mengalokasikan sejumlah pembuat putusan kepada semua anggota yang ada. Ini mengakibatkan tanggung jawab yang dibagikan dalam upaya mencapai keberhasilan yang diharapkan. Apabila anggota jaringan tidak terlibat didalam menetapkan maksud dari jaringan juga tidak bersedia menyumbangkan sumber daya maupun wewenang mereka ke jaringan yang ada, maka ada potensi jaringan tersebut tidak berhasil dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

3. *Information sharing* (berbagi informasi)

Ini meliputi upaya untuk memberikan kenyamanan akses kepada anggota, menjaga privasi (kerahasiaan identitas pribadi seseorang), dan membatasi akses bagi mereka yang bukan anggota, asalkan hal ini dapat diterima oleh semua pihak. Kemudahan akses ini dapat mencakup penggunaan sistem, perangkat lunak, dan prosedur yang sederhana dan aman untuk mengakses informasi.

4. *Commitment to a Common Purpose* (komitmen terhadap tujuan)

Commitment to a Common Purpose merupakan Sebuah jaringan tidak akan ada kecuali para anggotanya saling memperhatikan satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai hal-hal baik. Biasanya, tujuan-tujuan ini dapat ditemukan dalam pernyataan misi menyeluruh suatu lembaga pemerintah. Selain itu, baik pemangku kepentingan maupun pemangku kepentingan kebijakan tidak boleh mendapatkan manfaat dari janji-janji yang dibuat. Karenanya, kerja sama tersebut hanya akan menguntungkan satu pihak saja. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan kolaboratif, setiap orang diharapkan bekerja sama demi kepentingan semua orang dengan menyelesaikan permasalahan secara kolaboratif.

Dalam penelitian ini menggunakan teori dari DeSeve Moore, karena relevan dengan topik yang akan dibahas pada penelitian ini dalam konsep *collaborative governance*, konsep yang ada pada teori ini menjadi acuan adanya tolak ukur keberhasilan dari terjadinya proses *collaborative governance*.

2. **Pengelolaan Sampah**

Definisi pengelolaan sampah menurut “Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintrah Daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif dan efisiensi Pengelolaan sampah

adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”. Pengelolaan sampah bertujuan untuk :

- a. membudayakan kebersihan dan keindahan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta;
- b. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- d. memberikan nilai tambah untuk kegiatan ekonomi produktif, kreatif dan mandiri berorientasi pasar;
- e. memberdayakan masyarakat untuk pengelolaan sampah mandiri;
- f. memberikan daya tarik wisata di daerah; dan
- g. mengurangi kuantitas sampah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah.

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

Menurut (Hardiatmi, 2011) 4 faktor pendukung keberhasilan pengelolaan sampah :

1). Peran Serta Masyarakat

Pengelolaan setiap orang di masyarakat, tidak hanya mereka yang mempunyai otoritas, mempunyai peran dalam pengelolaan sampah. Sangat diharapkan bahwa masyarakat akan bersatu untuk mengatasi masalah

sampah, karena masyarakat menghasilkan tumpukan sampah melalui aktivitasnya sendiri.

2). Penerapan Sistem Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 4R

Dalam pengelolaan sampah, keterlibatan masyarakat adalah kuncinya. Efektivitas pengelolaan sampah kota dalam jangka panjang bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Setiap keluarga didorong untuk mengambil tanggung jawab pengelolaan sampah mereka dalam jangka panjang dengan mengikuti 4 R (*Reduce, Reuse, Replace dan Recycle*).

3). Potensi Bisnis Sampah

Sampah bisa disulap menjadi apa pun yang bernilai jual, maka sampah berpotensi menciptakan pasar baru. Ini bukanlah sesuatu yang perlu dinilai. Agar pengolahan sampah dapat dianggap sebagai suatu usaha yang sah, maka harus memperhatikan nilai keekonomian sampah sebagai bahan baku pembuatan suatu produk.

4). Dukungan dan Pendampingan Dari Pemerintah Daerah dan Dinas Terkait

Pengelolaan sampah yang efektif di perkotaan memerlukan upaya terkoordinasi dari semua orang yang terlibat dalam siklus sampah, mulai dari produksi hingga pembuangan akhir. Oleh karena itu, diperlukan proses pendampingan dan keterlibatan masyarakat serta pemangku kepentingan. Manajemen sampah dapat diterjemahkan sebagai pemahaman terhadap cara sampah dihasilkan, disimpan, dikumpulkan, diangkut,

dikelola, dan dibuang dengan mematuhi prinsip-prinsip kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik pelestarian lingkungan, estetika, serta dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan partisipasi masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk administrasi, keuangan, regulasi, perundang-undangan, perencanaan, dan teknik terkait pembuangan sampah.(Amri, 2023)

G. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini untuk membahas Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta Dengan Perspektif *Collaborative Governance*:

a. Collaborative Governance

Collaborative governance yaitu pengaturan terstruktur, berorientasi konsensus, dan deliberatif dimana satu atau lebih entitas publik melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif dengan tujuan mengembangkan atau menerapkan kebijakan publik atau mengawasi program atau aset publik. Ada beberapa item penting juga dalam keberhasilan kolaborasi pemerintah seperti *Trust among the participants*, *Distributive accountability*, *Information sharing* dan, *Commitment to a Common Purpose*.

b. Pengelolaan Sampah

Definisi pengelolaan sampah menurut “Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintra Daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif dan efisiensi Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”

2. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini untuk membahas Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta Dengan Perspektif *Collaborative Governance* :

Tabel 1.2 Definisi Operasional

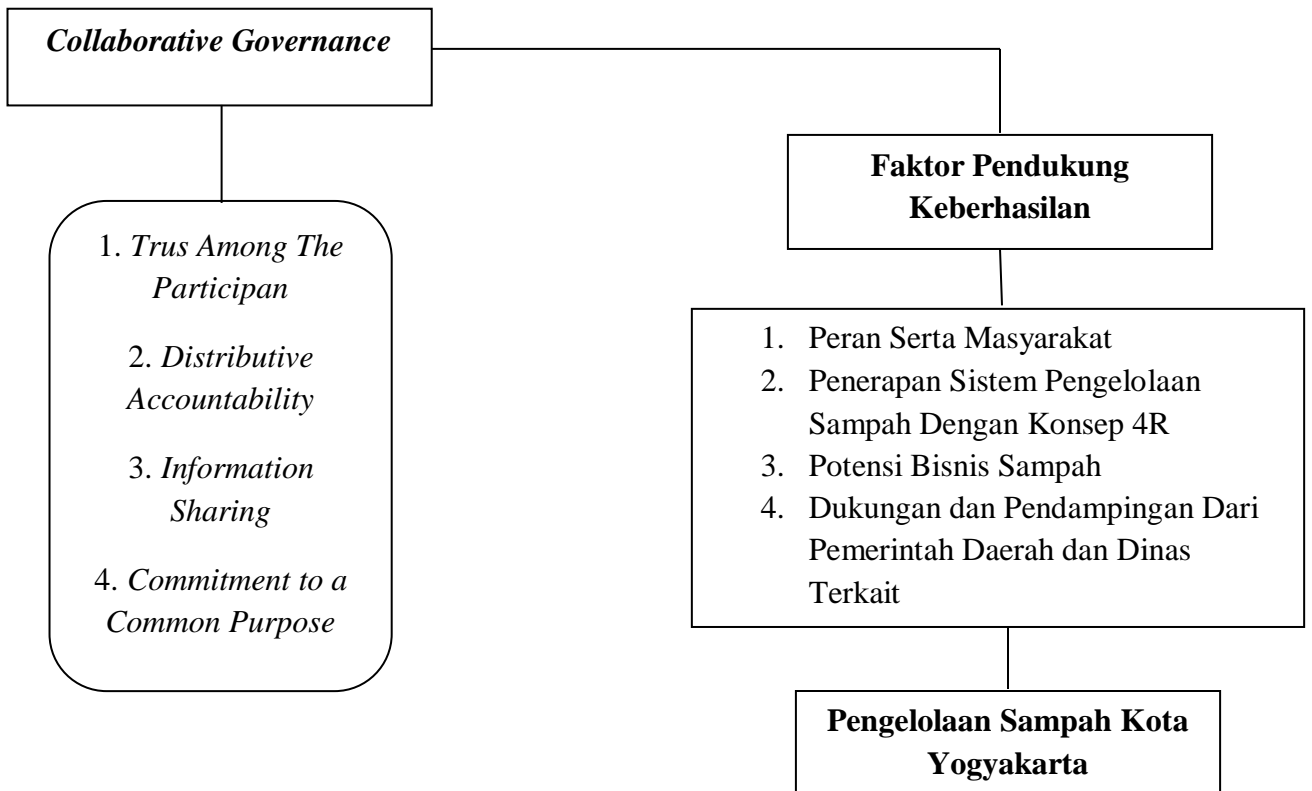
NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER
1.	<i>Trus Among The Participant</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepercayaan b. Tujuan bersama c. Ketepatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya saling percaya antara para <i>stakeholder</i> sebelum adanya tugas pengelolaan sampah bersama b. Visi, misi dan tujuan dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta c. Tepat waktu, tepat biaya, tepat sasaran dalam

			pengelolaan sampah.
2.	<i>Distributive Accountability</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaturan b. Manajemen c. Pengelolaan bersama 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur Tentang Pengelolaan sampah b. Proses perencanaan hingga evaluasi program kebijakan pengelolaan sampah c. Pembagian tugas antara stakeholder dalam pengelolaan sampah
3.	<i>Information Sharing</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemudahan akses informasi b. Pembatasan akses non anggota 	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Stakeholders</i> mudah mendapat informasi dalam pengelolaan sampah dari para <i>stakeholders</i> lain b. Koordinasi antara para <i>Stakeholders</i> dalam pembatasan akses informasi bagi non anggota
4.	<i>Commitment to a Common Purpose</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Perhatian b. Kespahaman 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan terhadap sistem pengelolaan sampah

			<p>masing-masing stakeholder.</p> <p>b. Penguatan tujuan bersama dalam pengelolaan sampah.</p>
--	--	--	--

H. Kerangka Berfikir

Bagan Kerangka Berfikir



I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ini juga digunakan untuk dapat meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana sebuah merupakan teknik kunci. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk dapat menyelidiki menggambarkan atau menjelaskan kualitas ataupun sebuah keistimewaan dari sebuah pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan atau juga tidak dapat digambarkan melalui sebuah pendekatan kuantitatif (Qotrun, 2021).

Penelitian kualitatif yang dikenal saat ini merupakan sebuah penelitian naturistik, naturistik ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini terjadi secara alamiah dan apa adanya dalam situasi yang normal juga tidak dapat dimanipulasi apapun serta konsinya juga menekankan pada deskripsi yang secara alami. Dalam hal ini pengambilan ataupun menyaring fenomena yang terjadi dalam keadaan yang sewajarnya. Dengan adanya sifat alami ini maka peneliti juga dituntut dalam keterlibatan secara langsung di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian ini juga untuk mengetahui tentang Collaborative

Governance yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta dalam pengelolaan sampah pada studi kasus Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta adalah ibu kota daerah istimewa sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kota ini adalah kota besar yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa.

- Provinsi: Daerah Istimewa Yogyakarta
- Luas: 32,5 km²
- Populasi: 422.732 (2017)
- Fauna resmi: Tekukur biasa
- Flora resmi: Kelapa gading
- Kode area telepon: +62 274
- Kode BPS: 3471

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer yang digunakan dalam penelitian berasal dari hasil wawancara Bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, pengelola Bank sampah Kota Yogyakarta dan masyarakat kota Yogyakarta.

b. Data Sukunder

Data Sekunder atau data pendukung untuk melengkapi Data Primer yang digunakan pada penelitian ini yang berasal dari berita atau

informasi online yang ada di website, hingga rangkuman beberapa artikel jurnal (Putri, 2024).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang akan diteliti. Teknik ini juga harus mempunyai teknik yang strategis dan juga secara sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai kenyataan dengan yang diteliti (Afra, 2023).

a. Observasi

Teknik observasi merupakan sebuah teknik yang melakukan sebuah pengamatan dan juga pencatatan yang dilakukan secara sistematis pada objek penelitian. Observasi juga biasanya dilakukan secara langsung dengan terjun ke lapangan. Pada proses ini peneliti melakukan observasi sebelum melakukan wawancara.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan sebuah teknik yang dilakukan secara langsung dan tatap muka antara penulis dengan narasumber. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam serta pengetahuan atau pendapat secara subjek terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti.

Tabel 1.3 Tabel Narasumber Wawancara

No	Narasumber	Jumlah
1.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	1
2.	Pengelola Bank Sampah Simul 5 Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta	1
3.	Masyarakat Kota Yogyakarta	3
	Total	5

c. Dokumentasi

Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis dengan demikian sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

5. Teknik Analisa Data

a. Analisa data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data dengan pengumpulan data dan reduksi. Informasi diperoleh melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Bank sampah Kota Yogyakarta, Masyarakat Kota Yogyakarta, Masyarakat dan menggabungkan informasi yang dikumpulkan dari penelitian sebelumnya, observasi, wawancara dan dokumen pendukung materi tambahan. Oleh karena itu, diharapkan memiliki data yang dapat diandalkan dan mampu mengambil kesimpulan yang dapat diverifikasi.

b. Penyajian data

Tujuan penyajian data dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan pemahaman penulis terhadap temuan penelitian yang

merupakan hasil observasi dan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Bank sampah Kota Yogyakarta, Masyarakat Kota Yogyakarta, TPS3R Nitikan, Pihak swasta. Ringkasan keseluruhan temuan penelitian dapat dihasilkan dengan cara ini.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan sebuah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu yang berbeda-beda, keabsahan data dalam penelitian kualitatif, secara realistik bersifat jamak dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula, keabsahan data dapat tercapai. dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data.

Pada penelitian ini menggunakan Triangulasi sumber data dengan menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto (Raharjo, 2010).

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir penelitian, Ketika peneliti menguraikan makna yang akan diungkapkan dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara,

dokumentasi dan observasi. Penulis harus mengeksplorasi pola, korelasi, korelasi persamaan, dan sebagainya yang relevan sebelum mengambil kesimpulan.